

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Daud Busroh. 1998. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azrul Azwar. 1990. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara Pablisher.
- Hatta Ali. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1992. *Sistem Administrasi Negara RI Jilid II*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rineka Aditama.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nuraida Mokhsen. 2018. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Adminstrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- S. Prajudi Atmosudiryo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gelora Madani Press.
- Sri Hartini. dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Internet:

Irsyan Hasyim. *Bawaslu Temukan 1096 Pelanggaran Netralitas*. 7 Juni 2019. <https://pemilu.tempo.co/read/1212776/bawaslu-temukan-1-096-pelanggaran-netralitas>. diunduh pada hari Minggu, 20 Oktober 2019. jam. 14.55 WIB.

Reyn Gloria. *Bawaslu Tangani Ribuan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019*. 6 Juni 2019. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani-ribuan-pelanggaran-netralitas-asn-saat-pemilu-2019>. diunduh pada hari Minggu, 20 Oktober 2019. jam. 14.53 WIB.

JURNAL:

Agus Mulya Karsona dan Tedi Sudrajat. "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara". *Media Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2016.

Arif Novianto. "Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, & Budaya Patron-Client". *Insight*. Vol 3. No. 2. 2019.

Bagus Sarnawa. "Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia". *Media Hukum*. Vol 24. No. 1. 2019.

Bagus Sarnawa. "Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum". *Media Hukum*. Vol 25. No. 2. 2018.

Gema Perdana. "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi", *Negara Hukum*. Vol 10. No. 1. 2019.

Harry Setya Nugraha. dkk. "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018". *Justisi Hukum*. Vol. 3. No. 1. 2018.

Raldi Tandayu. dkk. "Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015". *Eksekutif*. Vol. 2. No. 2. 2017.

Sri Hartini. dkk. "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)". *Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 3. 2014.

Sri Hartini. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Dinamika Hukum*. Vol 9. No. 3. 2018.

Tedi Sudrajat dan Sri Hartini. “Rekontruksi Hukum Atas Pola Penanganan pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil”. *Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 3. 2017.

Novembri Yusuf Simanjuntak. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 3. No. 3. 2017.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.